

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum dari isi skripsi penulis yang berjudul “ Alasan Tindakan Non-Militer Amerika Serikat terhadap Korea Utara terkait Provokasi Nuklir pada tahun 2012-2017. Adapun gambaran umum tersebut dibagi dalam beberapa bagian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian serta sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar di dunia. Negara ini memiliki total luas wilayah sebesar 9,833,517 km² dan jumlah penduduk sebanyak 323 juta jiwa.¹Tidak dapat dipungkiri Amerika Serikat muncul sebagai negara adikuasa pasca meletusnya perang dunia kedua. Posisi negara ini semakin tidak terkalahkan semenjak runtuhnya lawan besar yaitu Uni Soviet pada tahun 1991. Peristiwa tersebut menandakan Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang memiliki hegemoni terkuat hingga saat ini. Hegemoni Amerika Serikat juga didukung oleh kekuatan ekonominya yang sangat besar. Sistem ekonomi liberal kapitalis Amerika Serikat menjadi kiblat utama perekonomian dunia. Tercatat negara super power ini memiliki nilai PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar US\$ 19 triliun (2016).² Hal tersebut menempatkan Amerika Serikat menjadi peringkat pertama ekonomi terbesar dunia. Di sektor pertahanan militer negara ini juga menduduki urutan pertama dinilai dari kualitas persenjataan, jumlah tentara, pertimbangan geografis, logistik, sumber daya alam, dan industri senjata.

¹Central Intelligence Agency, *North Amerika: United States*, dikutip dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html>, diakses pada 23 Oktober 2017

²World Bank, *GDP market price*, dikutip dari <http://dataworldbank.org/indicator>, diakses pada 23 Oktober 2017

Pasca Perang Dingin berakhir Amerika Serikat tengah menikmati kekuatan paralel yang dimilikinya meliputi kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan kekuatan pengaruh politik. Disamping itu negara ini mengklaim bahwa mereka adalah polisi dunia. Peran Amerika Serikat sebagai polisi dunia merupakan cara untuk menyebarkan paham kebebasan dan demokrasi dengan tujuan mencapai perdamaian. Adanya Doktrin Monroe merupakan dasar awal mengapa Amerika Serikat melepaskan diri dari masa isolasi kemudian melakukan tindakan-tindakan ikut campur dalam masalah yang terjadi di dunia. Doktrin Monroe adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat dimana diterapkan pada 2 Desember 1823. Berawal dari keharusan AS untuk turun tangan atas upaya negara-negara Eropa untuk menjajah atau melakukan campur tangan terhadap negara-negara di benua Amerika Latin yang dipandang sebagai sebuah agresi. Karena pada saat itu Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonomi terkait sumber daya di Amerika Latin. Dari doktrin tersebut AS memiliki kebijakan *defensive* untuk menjaga keamanan dan kepentingan negaranya dari berbagai ancaman.

Keagresifan Amerika Serikat dalam merespon setiap sinyal ancaman merupakan upaya pengaplikasian dari doktrin *Pre-emptive Strike*. Presiden George W. Bush pada pidatonya pada tahun 2002 saat menghadiri upacara Akademi Militer Amerika Serikat menegaskan perlu adanya kebijakan mendahului serangan musuh (*Pre-emptive Strike*)³ guna melindungi keamanan AS dari aksi terorisme. Namun doktrin ini mengalami perluasan penggunaan di mana diadaptasikan tidak hanya untuk melawan terorisme saja, yakni digunakan untuk merespon berbagai ancaman dari lawan. Doktrin ini dapat diartikan sebagai langkah pencegahan yang dilakukan oleh AS melalui tindakan penyerangan terlebih dahulu terhadap musuh sebelum musuh menyerang. Dewan PBB

³*Pre-emptive Strike*, doktrin militer dimana sebuah negara mengklaim hak untuk melancarkan serangan ofensif pada musuh potensial sebelum musuh tersebut memiliki kesempatan untuk melakukan serangan. Selengkapnya dapat dilihat di <http://www.britannica.com/topic/preemptive-force>, diakses pada November 2017

menyetujui ketika Presiden Bush meyakinkan dunia bahwa pembentukan pasukan internasional yang dipimpin oleh AS merupakan upaya perlawanan terhadap ancaman. Atas doktrin inilah yang menjadi dasar serangan AS terhadap Irak pada tahun 2003 terkait deteksi kepemilikan senjata pemusnah massal. Tindakan invasi ini terdiri dari 21 hari operasi tempur besardengan pengerahan 177.194 tentara dimana merupakan gabungan kekuatan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya Inggris, Australia dan Polandia. Pemilihan penggunaan serangan militer juga dilakukan Amerika Serikat untuk mengobarkan perang di wilayah Afganistan. Atas perintah George W. Bush militer Amerika Serikat melakukan serangan terhadap kamp-kamp pelatihan teroris Al Qaeda dan instalasi militer rezim Taliban di Afganistan.

Dalam kasus lain strategi *Pre-emptive Strike* ini juga dipakai sebagai legalitas AS untuk melakukan serangan terhadap Suriah. Pada 6 April 2017 Amerika melancarkan serangan tiba-tiba ke Suriah dengan menggunakan puluhan rudal Tomahawk. Amerika Serikat mengklaim bahwa serangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tegaknya hukum internasional. AS mengutuk rezim Bashar Al-Asad dalam penggunaan senjata kimia karena banyak memakan warga sipil. Pemerintah Suriah disinyalir menggunakan senjata kimia gas sarin untuk melawan kelompok pemberontak, di mana diketahui Rusia merupakan sekutu yang membantu mempertahankan rezim Bashar Al-Asad. Menurut Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson serangan rudal tersebut telah diperhitungkan secara matang dan akurat. Tindakan tersebut diambil karena pemerintah Suriah mengingkari perjanjian pada tahun 2013 mengenai kesepakatan penyerahan senjata kimia.

Amerika Serikat memang gencar dalam memerangi tindakan pengembangan senjata pemusnah masal. Saat ini Amerika Serikat telah menghadapi provokasi ancaman nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Secara historis kedua negara ini merupakan musuh abadi terkait Korea Utara merupakan sekutu dekat Rusia. Negara yang berideologikan “juche” ini

menganggap Amerika Serikat adalah musuh utama. Hal tersebut berawal ketika intervensi Amerika pasca Perang Dunia Kedua terhadap Semenanjung Korea yang menyebabkan terbaginya wilayah Korea menjadi Korea Utara dan Selatan. Saat ini Korea Utara terus mengembangkan teknologi nuklir sebagai senjata militernya. Program Nuklir negara ini diawali ketika Korea Utara membuat perjanjian dengan Uni Soviet terkait kerjasama penggunaan energi nuklir. Dalam perjanjian ini Korea Utara mengirimkan ilmuwan-ilmuan dan teknisi ke Uni Soviet untuk mendapatkan pelatihan dalam program Moscow. Pada tahun 1959, Soviet setuju memasok Korea Utara dengan reaktor riset untuk membantu pengembangan penelitian nuklir.

Pada tanggal 10 Oktober 2003 Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) memutuskan untuk keluar dari perjanjian NPT. Setelah selama 18 tahun negara ini menyetujui NPT terhitung sejak tahun 1985. NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang adanya pembatasan pengembangan senjata nuklir dimana perjanjian ini dijadikan sebagai sumber hukum internasional. Awalnya perjanjian ini di inisiasi oleh Amerika Serikat terkait kekhawatirannya atas pengembangan nuklir di negara-negara lain karena berpotensi akan menjadi ancaman. Namun dengan kebijakan Kim Il Sung untuk menarik diri dari perjanjian NPT, membuat Korea Utara tidak lagi terikat dengan perjanjian yang tertera dalam kesepakatan NPT. Sehingga Korea Utara lebih leluasa untuk mengembangkan program reaktor nuklirnya. Pertemuan Six Party digelar untuk membahas hal ini dimana diikuti oleh Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia, dan Korea Selatan.

Ditengah kecaman dunia internasional dan sanksi-sanksi PBB, Korea Utara tetap terus melakukan pengembangan senjata nuklirnya. Serangkaian upaya *preventif* AS pun telah dilakukan dalam bidang ekonomi guna mendesak posisi Korea Utara. Amerika Serikat telah memberikan banyak tekanan ekonomi termasuk jaringan perdanganan Korea Utara. Presiden Amerika Serikat Donald

Trump telah memberikan sanksi sanksi terhadap berbagai perusahaan dan institusi keuangan yang bekerjasama dengan Korea Utara dengan tujuan memutus sumber aliran dana terkait proyek pengembangan senjata nuklir tersebut. Sebanyak 8 bank dan 26 penyedia finansial Korea Utara telah mendapat sanksi dari Amerika Serikat.⁴ Namun sanksi-sanksi ekonomi yang digencarkan oleh Amerika Serikat juga tidak diindahkan.

Uji coba nuklir Korea Utara di bawah kediktatoran generasi Kim terus dikembangkan. Dari data yang tercatat dari tahun ke tahun kemampuan nuklir Korea Utara mengalami perkembangan yang pesat. Terdapat lima kali uji coba nuklir yang berhasil yakni pada tahun 2006, 2009, 2013, Januari 2016, September 2016 dan 2017. Pada uji coba pertama 2006 nuklir Korea Utara hanya memiliki daya ledak kurang dari 1 kiloton, kemudian pada percobaan nuklir kedua sebesar 2 kiloton. Disusul pada percobaan tahun 2013 mengalami peningkatan daya ledak yang signifikan yakni sebesar 7 kiloton. Terakhir pada tahun 2017 diindikasikan merupakan uji coba nuklir terkuat Korea Utara yakni menghasilkan daya ledak antara 100 kiloton.

Perkembangan teknologi nuklir Korea Utara meningkat pesat dan semakin mengkhawatirkan. Provokasi memang merupakan alat kebijakan Kim Jong-Un untuk mendapatkan pengakuan Internasional.⁵ Disamping mengalami peningkatan teknologi nuklirnya, teknologi rudal di mana difungsikan sebagai kendaraan nuklir juga mengalami perkembangan. Berawal dari peluncuran rudal yang hanya memiliki jangkauan sekitar 150 km yaitu KN-02. Kini perkembangan rudal Korea Utara mengalami peningkatan kapabilitas dan jangkauan yang signifikan. Saat ini Korea Utara memiliki jenis rudal Taepodong-2/UNHA-3 dimana

⁴Tribunnews.com, *Amerika Mulai Berlakukan Sanksi Ekonomi, 8 Bank Korea Utara Jadi Sasaran*, dikutip dari

<http://www.tribunnews.com/internasional/2017/09/27/amerika-mulai-berlakukan-sanksi-ekonomi-8-bank-korea-utara-jadi-sasaran>, diakses pada 24 October 2017

⁵Ken E. Gause.2016.*North Korea's Provocation and Escalation Calculus: Dealing with the Kim Jong-un Regime*, Washington: CNA, hal.46

memiliki daya jangkau 10.000 km. Tercatat pada bulan September 2017 rudal balistik antar benua (ICMB) Korea Utara berhasil memasuki area udara Jepang setelah dimana sebelumnya juga berhasil pada tahun 2016. Provokasi Korea Utara terus berlanjut ketika Kim Jong-Un mengeluarkan propaganda bahwa Korea Utara sedang membidik Guam untuk menjadi sasaran nuklirnya terkait keinginan mereka untuk menghancurkan Amerika Serikat, di mana di wilayah tersebut terdapat dua pangkalan militer AS. Uji coba ICMB untuk membuktikan bahwa seluruh wilayah AS telah berada dalam jangkauan serangan Korea Utara.⁶

Provokasi nuklir yang digencarkan Korea Utara meningkatkan kewaspadaan Amerika Serikat. Telah banyak upaya Amerika Serikat untuk bisa mengendalikan program nuklir Korea Utara namun belum menunjukkan hasil yang nyata. Langkah pemberian sanksi-sanksi ekonomi melalui kerjasama dengan negara-negara lain seperti pemberlakuan embargo ekspor Korea Utara telah diberlakukan. Amerika Serikat juga telah lelah untuk melakukan perundingan dengan Korea Utara. Upaya perundingan bukan lagi pilihan yang strategis, hal tersebut terkait rekam jejak yang buruk bahwa Korea Utara selalu melanggar perjanjian dalam kurun 25 tahun. Secara perhitungan Amerika Serikat memiliki kemampuan militer yang jauh lebih besar dibanding Korea Utara. Sehingga sebenarnya bisa dengan mudah Amerika Serikat mengalahkan dan menghancurkan negara tersebut dengan serangan militernya. Seperti yang diketahui upaya *pre-emptive strike* melalui agresi langsung telah sering dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menumpas lawannya seperti Irak, Afganistan dan Suriah. Namun dalam kasus ini Amerika Serikat tidak menggunakan langkah serangan militer langsung terhadap negara Korea Utara.

⁶Bbc.com, Kim Jong-Un: Seluruh AS dalam Jangkauan Serangan Korea Utara ,dikutip dari <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40761856>, diakses 25 Oktober 2017

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Mengapa Amerika Serikat tidak melakukan serangan militer langsung dalam merespon ancaman nuklir Korea Utara?

C. Kerangka Pemikiran

1. Teori Aktor Rasional

Teori merupakan bentuk penjelasan paling umum yang bisa memberitahu mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Teori menggabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan.⁷

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah disusun diatas, penulis akan menggunakan Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri sebagai alat bantu untuk menganalisis permasalahan. Pembuatan Keputusan Luar negeri merupakan strategi tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya untuk mencapai kepentingan nasional. Menurut Graham T.Allison terdapat tiga model untuk menjelaskan pembuatan keputusan politik luar negeri. Ketiga teori tersebut yakni, Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi, dan Model Politik Birokratis. Untuk menganalisis kasus ini, digunakan Model Aktor Rasional untuk membantu menjelaskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait tindakan non-agresi dalam menghadapi Korea Utara.

Teori Aktor Rasional sering digunakan untuk menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Graham T.Allison model aktor rasional, diasumsikan bahwa negara kesatuan adalah pemain

⁷Mohtar Mas'oed.1990.*Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*,Jakarta: LP3ES, hal.217

kunci dan mereka bertindak rasional dimana menghitung untung dan rugi dari berbagai pilihan kebijakan dalam rangka memaksimalkan tujuan mereka.⁸ Maka dalam teori ini pengambilan keputusan merupakan hasil dari rasionalisasi aktor politik. Dimana yang dimaksudkan sebagai aktor disini adalah pemerintah. Proses pengambilan kebijakan oleh pemimpin negara tersebut melewati sebuah proses intelektual. Dengan demikian seorang pengambil kebijakan merupakan individu yang menggunakan penalaran yang logis untuk memutuskan suatu tindakan. Kebijakan politik luar negeri harus berdasarkan pada tujuan yang jelas melalui pemilihan strategis dari alternatif-alternatif yang ada. Seorang aktor pengambilan kebijakan harus mengkalkulasi keuntungan dan kerugian yang akan didapat dalam setiap opsi. Karena tindakan pengambilan keputusan haruslah mengutamakan kepentingan nasional negara tersebut.

Model ini menggambarkan bahwa dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif tersebut, para pembuat keputusan menggunakan kriteria “optimalisasi hasil”.⁹ Untuk mencapai hal tersebut maka seorang pemimpin harus siap untuk melakukan perubahan kebijakan sebagai bentuk penyesuaian. Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.¹⁰ Tindakan rasional pemerintah monolit tersebut dilakukan melalui pertimbangan untung rugi dari setiap alternatif kebijakan yang akan diambil.

⁸James E.Dougherty dan Robert L.Pfaltzgraff.2001.*Contending Theories of International Relations*,New York: Longman,hal .571

⁹Mohtar Mas' oed ,Op.cit .,hal.276

¹⁰*Ibid*

Dalam hal kasus ini, keputusan Amerika Serikat untuk tidak melakukan agresi militer terhadap Korea Utara bisa dianalisis melalui teori aktor rasional. Dalam lebih dari empat dekade sejak kepemimpinan Richard Nixon hingga era kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat tidak menjadikan agresi militer langsung terhadap Korea Utara sebagai pilihan. Hal tersebut sangat berbeda ketika dibandingkan dengan contoh kasus lain seperti Irak, Suriah dan Afganistan yang notabene sama-sama memiliki atau terindikasi senjata pemusnah masal. Dimana sikap kebijakan Amerika Serikat dalam mengatasi permasalahan dengan ketiga negara tersebut melalui cara agresif.

Perubahan pola kebijakan Amerika Serikat ini merupakan proses penyesuaian kebijakan luar negeri setelah melewati pertimbangan terhadap alternatif-alternatif kebijakan yang ada. Dalam menentukan keputusan untuk melakukan serangan *pre-emptive* atau tidak terhadap Korea Utara, Amerika Serikat melakukan kalkulasi untung-rugi terhadap setiap opsi. Karena dalam setiap alternatif keputusan Amerika Serikat harus siap terhadap segala konsekuensi yang akan diperoleh. Amerika Serikat memang dalam posisi yang sulit untuk menentukan pilihan keputusan yang baik terhadap provokasi serangan nuklir Korea Utara yang semakin meningkat.

2. Konsep Massive Retaliation

Merupakan konsep militer dan strategi nuklir mengenai respon masif dari John Foster Dulles, dimana sebuah negara akan melakukan pembalasan melalui kekuatan yang jauh lebih besar dibanding serangan awal.¹¹ Jika terjadi serangan oleh musuh, maka negara yang diserang akan membalas dengan serangan yang

¹¹Joseph M. Sircusa and David G. Coleman.2000. '' *Scaling the Nuclear Ladder: Deterrence from Truman to Clinton*'' dalam jurnal *Australian Journal of International Affairs*, Volume. 54, Nomor. 3

mengakibatkan kehancuran lebih. Serta kemungkinan akan melibatkan penggunaan senjata nuklir dalam skala besar. *Massive Retaliation* dilakukan dengan peringatan penting bahwa serangan ringan sekalipun terhadap negara nuklir dapat menyebabkan pembalasan nuklir habis habisan. Kebijakan ini mengabaikan penggunaan prinsip pembalasan proporsional. Konsep *Massive Retaliation* muncul pada 1953, ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Foster Dulles, mengumumkan kemunculan sebuah kebijakan baru, yang kemudian dikenal sebagai Pembalasan Massal, sebuah respon dalam ukuran besar terhadap Perang Korea dan Indocina. Konsep ini menjelaskan bahwa Amerika Serikat saat itu tidak akan lagi mempertahankan kekuatan konvensional untuk menyerang musuh potensial di semua titik berdasarkan *man-for-man*, *gun-for-gun* dan *tank-for-tank*. Sebaliknya, Amerika Serikat akan menanggapi dengan cara kekuatan pembalasan dendam berlipat serta memungkinkan penggunaan senjata nuklir.

Maka dalam penerapan kasus ini, Amerika tidak melakukan serangan terhadap rezim Kim Jong Un karena tindakan tersebut akan menimbulkan “Pembalasan Masif” dari pihak Korea Utara. Keputusan untuk melancarkan Preemptive Strike terhadap Korea Utara akan berpotensi mengakibatkan serangan balasan yang lebih besar dari negara ini. Dimana secara otomatis akan membahayakan keamanan dan pertahanan Amerika Serikat yang akan meluas hingga seluruh negara-negara di dunia. Karena Korea Utara merupakan negara pengembang senjata pemusnah massal nuklir. Sehingga kebijakan untuk menggencarkan serangan akan menimbulkan resiko tinggi karena dapat memantik penggunaan nuklir.

Terlebih negara tertutup ini bukan hanya terindikasi memiliki senjata nuklir, namun secara nyata negara ini telah berhasil mengembangkan senjata nuklir

menjadi kekuatan utama militernya. Sejak uji coba nuklir Korea Utara pertama pada tahun 2006 sampai dengan uji coba terakhir pada tahun 2017 kemampuan daya ledak nuklir negara ini semakin meningkat. Jika Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang Korea Utara maka yang terjadi adalah negara ini akan melakukan serangan balasan yang lebih membahayakan. Dimana berpotensi menggunakan senjata nuklir untuk menyerang balik Amerika Serikat. Sehingga pemerintah Amerika Serikat tidak mungkin mengorbankan kepentingan keamanan nasional mereka walaupun pilihan menggunakan kekuatan militer dapat berhasil menghancurkan wilayah Korea Utara. Sehingga Amerika Serikat sampai saat ini masih mengandalkan upaya non militer seperti negosiasi dan sanksi ekonomi untuk mengendalikan Korea Utara. Maka dibawah ini merupakan analisis untung-rugi jika Amerika Serikat melakukan serangan militer langsung atau tidak terhadap Korea Utara:

Tabel 1.2
Alternatif-Alternatif Pembuatan Keputusan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Korea Utara

| Alternatif | Keuntungan | Kerugian |
|---|---|--|
| Alternatif I (Amerika Serikat melakukan serangan militer terhadap Korea Utara) | 1.)Korea Utara akan mengalami kehancuran. 2.)Pergembangan nuklir Korea Utara terhenti. | 1.) Amerika Serikat akan mendapat <i>Massif Retaliation</i> yaitu serangan balasan yang lebih besar dari Korea Utara, yang berpotensi menggunakan senjata nuklir. 2.) Sekutu sekutu |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>AS, Korea Selatan dan Jepang menjadi korban terkait letak geografis yang dekat.</p> <p>3) Bertambahnya lawan dengan bergabungnya China untuk membela pasukan Korea Utara.</p> |
| <p>Alternatif II (Amerika Serikat tidak melakukan serangan militer terhadap Korea Utara)</p> | <p>1. Menghindarkan penduduk Amerika Serikat dari <i>Massif Retaliation</i> Korea Utara yang berpotensi besar menggunakan nuklir.</p> <p>2. Menghindarkan penduduk Korea Selatan dan Jepang menjadi korban serangan Korea Utara.</p> <p>3. Amerika Serikat tidak mendapat ancaman dari PBB</p> | <p>1.) Korea Utara dapat terus mengembangkan teknologi senjata pemusnah massal (nuklir).</p> <p>2.) Korea Utara meningkatkan provokasi ancaman terhadap Amerika Serikat untuk menyerang wilayahnya.</p> |

Dari perbandingan alternatif-alternatif diatas, bisa dikatakan pilihan kebijakan Amerika Serikat untuk melakukan serangan militer terhadap Korea Utara baik menggunakan senjata konvensional ataupun nuklir memiliki lebih banyak resiko kerugian. Sehingga sebagai aktor rasional pemerintah Amerika Serikat akan menghindari kebijakan yang mengandung tingkat kerugian lebih besar dibanding keuntungan yang didapat. Memang dua opsi tersebut sama-sama memiliki kerugian, namun alternatif kebijakan non-militer memiliki resiko kerugian lebih rendah. Maka berdasar pada perhitungan rasional alternatif-alternatif diatas, pemerintah Amerika Serikat akan cenderung memilih untuk tidak melakukan penyeragan militer langsung terhadap Korea Utara. Ditambah dalam pidatonya Donald Trump mengatakan dalam menghadapi kasus ini Amerika Serikat tidak akan mengorbankan keselamatan negara sekutu-sekutunya yaitu Korea Selatan dan Jepang.

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dijelaskan bahwa alasan Amerika Serikat tidak menyerang Korea Utara adalah sebagai akibat dari tindakan aktor rasional, yakni mengambil opsi kebijakan yang memiliki lebih banyak keuntungan. Adapun keuntungannya sebagai berikut :

1. Menghindarkan Amerika Serikat dari resiko serangan balasan besar-besaran (*Massive Retaliation*) dari Korea Utara.
2. Menghindarkan Sekutu dekat Amerika Serikat yakni Korea Selatan dan Jepang menjadi korban.
3. Pemerintah Amerika Serikat tidak mendapat kecaman dari PBB.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan mengapa Amerika Serikat tidak memilih tindakan agresi langsung dalam merespon ancaman nuklir Korea Utara.
2. Untuk memberikan gambaran tentang perkembangan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Korea Utara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Dimana ini penelitian ini bersifat analisis dalam menjelaskan alasan Amerika Serikat memilih tindakan non-agresi terhadap Korea Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau *library research* serta melalui data dari internet (website, media online) yang terpercaya guna menghasilkan data yang relevan. Kemudian penulisan skripsi ini mengaplikasikan metode deduksi, yaitu penggunaan teori sebagai landasan analisa dalam tujuan memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membatasi penelitian untuk memfokuskan pembahasan masalah yang akan dijelaskan. Penulis akan membatasi kajian pada politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Korea Utara dalam rentan waktu 2012 hingga 2017. Pada tahun 2012 dibawah pemerintahan baru Kim Jong Un, Korea Utara melanggar sanksi PBB dengan melakukan peluncuran roket Unha 3. Pada 2017 Korea Utara berhasil sukses melakukan uji coba bom hydrogen dan meluncurkan rudal antar benua (ICBM) untuk mengancam menyerang Amerika Serikat. Namun tidak menutup kemungkinan penulis akan menggunakan data diluar jangkauan penelitian selama data tersebut masih relevan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Pada bab ini membahas tentang dinamika politik luar negeri Amerika Serikat diantaranya yaitu tentang prinsip kebijakan luar negeri, kebijakan Amerika Serikat selama era Perang Dingin, kebijakan Amerika Serikat pasca Era Perang Dingin, kemudian kebijakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat terhadap Korea Utara.

BAB III: Pada bab ini membahas tentang aktivitas kebijakan pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Hal tersebut meliputi seberapa bahaya teknologi nuklir yang dimiliki Korea Utara. Termasuk akan membahas aktivitas kebijakan uji coba peluru kendali Korea Utara, serta menguraikan kebijakan provokasi nuklir Korea Utara dibawah kepemimpinan Kim-Jong-Un.

BAB IV: Pada bab ini berisi pembuktian hipotesa mengenai keputusan Amerika Serikat untuk memilih tindakan non-agresi dalam menghadapi Korea Utara.

BAB V: Pada bab ini berisi tentang rangkuman atau kesimpulan pembahasan penelitian.